

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Ikhtisar Indonesai Edisi Ketiga*, Jakarta : Balai Pustaka. 2005

Djaja S. Meliala, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, 1982

Djoko Supadmo, *Seri-B Bagian Pertama Ketentuan-Ketentuan dan Komentar Mengenai Jual Beli, Tukar Menukar, Sewa Menyewa, Dalam Praktek Teknik Pembuatan Akta*, Bina Ilmu, Surabaya, 1995

Jimly Asshiddigie, *Independensi Dan Akuntabilitas Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Renvoi, Jakarta, 2003

K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Ghalia Indonesia, Jakarta , 1977

Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001

Mariam Daris, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikitan dengan Penjelasan*, PT. Alumni, Bandung, 2005

_____, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2001

Ronny Hanitijo Soemantri, “*Metode Penelitian Hukum Dan Jurumentri*”, Ghalia Indonesia Semarang, 1998

R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, “*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*”, Pradnya Paramita, Jakarta, Cet-XIV, 1981

_____, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985

Salim MS, *Hukum Kontrak, Teori & Tekriik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008

Sri Gambir Melati Hatta, *Beli Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama Pandangan Masyarakat Dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, Alumni, Bandung, 1999,

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Benda*, Liberty, Yogyakarta, 2008

Soerjono Soekamto & Sri Mamuji, "*Penelitian Hukum Normatif*", P.T. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2001

Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Rincka Cipta, Jakarta, 2007

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-IV

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Pemerintah No. 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 tahun 1982 tentang larangan penggunaan surat kuasa mutlak sebagai pemindahan hak atas tanah

C. Sumber Lain

Ali Boediarso, *Putusan Badan Peradilan*, Majalah Varia Peradilan, Edisi Oktober, 1990.

Habib Adjie, *Penegakan Etika Profesi Notaris Dari Perspektif Pendekatan Sistem*, Media Notariat, Edisi April-Juni, INI, Jakarta, 2002

Nelly Sriwahyuni Siregar :*Tinjauan Yuridis Kedudukan Kuasa Mutlak Dalam Peralihan Hak Atas Tanah Oleh Notaris / PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah)*. Thesis.

[Http://www.suratkuasamutlaksebagaiadasarpemindahanhakatastanah.blogspot](http://www.suratkuasamutlaksebagaiadasarpemindahanhakatastanah.blogspot).

Diakses pada tanggal 19 November 2017 pada pukul 19.25 WIB

[Http://jdih.bpk.go.id/informasi hukum/Surat Kuasa.pdf](http://jdih.bpk.go.id/informasi_hukum/Surat_Kuasa.pdf), diakses pada tanggal 10 November 2017 Pada pukul 14.25 WIB

<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/10/perjanjian-pemberian-kuasa.html>.
dikases pada tanggal 10 Desember 2017 Pada pukul 23.00 WIB

<Http://ejurnal.uij.ac.id/index.php/REC/article/viewFile/88/84KuasaMutlak>,
diakses pada tanggal 19 Desember 2017 pada pukul 14.00 WIB